

Analisis Konsep Kebijakan Publik Studi Kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sri Devi Monica

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
sridevimonica98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan sebuah analisis kebijakan publik program Dana BOS. Tujuan penelitian ini mengetahui konsep pelaksanaan dan aspek yang mempengaruhi kebijakan publik program Dana BOS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumen – dokumen yang disesuaikan dengan penelitian. Konsep Pelaksanaan kebijakan publik terkhusus Dana BOS yaitu membiayai operasional sekolahnya secara mandiri. Kebijakan BOS disatu sisi membantu sekolah negeri/swasta dalam pembiayaan operasional. Dana BOS juga membantu orang tua dalam membiayai sekolah. Terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi.

Kata Kunci : Konsep, Kebijakan Publik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Abstract

This study describes an analysis of the public policy of the BOS Fund program. The purpose of this research is to know the concept of implementation and aspects that influence the public policy of Dana BOS program. This study uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques with observations and documents - documents adapted to the research. The concept of implementing public policies, especially the BOS Fund, is to independently finance school operations. The BOS policy on the one hand helps public/private schools in operational financing. The BOS funds also help parents pay for school fees. There are several things that become obstacles in the implementation of policies 1) Communication, 2) Resources, 3) Disposition, 4) Bureaucratic Structure.

Keywords: Concept, Public Policy, School Operational Assistance (BOS)

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan tentunya hak semua warga negara, dan karena itu negara berkewajiban untuk mendanai kegiatan

ini. Pasal 31 UUD 1945 mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD diprioritaskan. Istilah kebijakan mengandung makna bahwa kebijakan hadir didasarkan oleh seiring

berjalannya waktu dari masa ke masa serta mewujudkan berbagai tujuan – tujuan. Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan merumuskan sebuah kebijakan berupa suatu rencana pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik - praktik yang terarah. Maka dalam hal ini adanya suatu kebijakan itu muncul dikarenakan ada permasalahan yang ingin diselesaikan (Mariyati, 2015).

Kebijakan publik adalah sebuah ilmu yang relatif baru, karena pertama kali muncul secara historis pada pertengahan 1960-an. Hadir sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun sebagai ilmu politik. Namun, analisis kebijakan publik sendiri sudah lama eksis dan bisa dikatakan ada sejak adanya peradaban pada umat manusia. Pada masa itu, bisa dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari kebijakan publik. Kehidupan manusia yang dimaksud disini ialah kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tatanan makro pada sebuah kehidupan dalam lingkungan masyarakat ataupun bernegara (Bakry, 2010).

Kebijakan publik juga mengatur dalam sebuah keputusan ataupun suatu pilihan tindakan yang dilakukan secara langsung pada pengelolaan serta pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia mengenai kepentingan publik, yakni mengacu pada rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Dilihat pada prosesnya, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari sebuah sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara banyaknya gagasan, ideologi dan kepentingan yang mewakili sebuah sistem politik pada sebuah negara.

Berbagai cara pandang ada yang mengartikan bahwa kebijakan publik

hanya bagian dari sebuah dokumen pemerintah yang bersifat resmi seperti undang-undangan, dan sebuah peraturan- pemerintah. Disisi lain, ada yang mengartikan sebagai salah satu strategi, kerangka tindakan serta sebagai pedoman acuan atau sebagai landasan. Keberadaan suatu kebijakan sangatlah dibutuhkan mengingat hal ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan disini bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan tidak merugikan berbagai pihak khususnya masyarakat.

Mengingat pentingnya analisis kebijakan tentulah sangat perlu dilaksanakan, agar mampu menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bahan evaluasi serta analisa pada pelaksanaan kebijakan publik.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Publik? Apa sajakah aspek yang mempengaruhi kebijakan Publik?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Dasar Kebijakan Publik

Dasar dari kebijakan publik adalah lahirnya konsep-konsep kebijakan. kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami dalam kombinasi dengan istilah “swasta”(Putri, 2021). Menurut Tachjan dalam Herdiana, mengatakan bahwa substansi kebijakan pada hakekatnya adalah suatu keputusan yang masih saling berhubungan antara satu dengan yang lain yang memiliki maksud dalam pencapaian tujuan, sedangkan suatu latar belakang situasi dan peristiwa dipengaruhi oleh politik itu sendiri dan mempengaruhi persoalan politik (Herdiana, 2018).

Menurut pengertian ketertiban dan kesusilaan umum di atas, politik pada hakikatnya adalah suatu kegiatan nasional

yang bertujuan mengatur kehidupan manusia atau masyarakat (Agustino, 2008). Berbagai ahli telah mengungkapkan pemahaman mereka tentang kebijakan publik, seperti Dye (2005) menyebutkan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah” untuk mencapai tujuan yang ditetapkan kebijakan publik sebagai *“whatever government choose to do or not to do”* (Wibawa, 1994) telah menyebutkan pemahaman tentang kebijakan publik merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai target rumusan negara.

Menurut (Iskandar, 2012) kebijakan ini adalah suatu program, tindakan, pengaktifan, keputusan, dan sikap yang dilakukan oleh para aktor politik dengan tujuan sampai pada tahap implementasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. dari rencana dalam bentuk. Selain itu, (Nugroho, 2012) menyebutkan bahwa ada beberapa masalah dalam keterlibatan umum dan moral. Pertama, hal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak. Kedua, berupa peraturan dan perjanjian tertulis pemerintah. Ketiga, reifikasi kerjasama antara legislatif dan pemerintah. Ketiga, mewujudkan Kerjasama legislative dan eksekutif (Islamy, 1994) ia mengungkapkan beberapa hal yang penting pada kebijakan publik, sebagai berikut: Pertama, bahwa hal utama kebijakan public berupa rangkaian penetapan Tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, bahwa perlunya adanya tindakan nyata tidak hanya berupa pernyataan. Ketiga, bahwa kebijakan publik, pada pelaksanaannya kebijakan publik dilaksanakan atau tidak itu haruslah sesuai dengan landasan maksud dan tujuan tertentu. Keempat, kebijakan publik harus, tanpa kecuali, didasarkan pada

kepentingan publik atau seluruh anggota masyarakat

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Dana dukungan pengelolaan sekolah (selanjutnya disebut dana BOS) adalah dana yang terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran fisik lembaga pendidikan. Program dukungan manajemen sekolah yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek, dan dalam melaksanakan, menyalurkan, dan mengelola Dana BOS harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Agama sebagai departemen BOS yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengelola program (Mulyono, 2015).

Lembaga sekolah yang dipercayakan mendapat dana BOS memiliki perlakuan yang khusus dan memiliki ketentuan (Kemendikbud, 2015) diantaranya: 1) Telah dibuat pemberitahuan tertulis kepada orang tua siswa dan keterangan jumlah dana BOS yang diterima dari lembaga. 2) menumbukan sikap tanggungjawab dengan sejumlah dan yang diterima. 3) melunasi atau membebasakan upungutan iuran dari orang tua peserta didik. Pendidikan non personalia kepada para peserta didik yang kurang mampu dan juga meringankan peserta didik lainnya. Hal ini didasarkan pada program pelaksanaan program wajib belajar dan pendekatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan cara ini, sekolah dapat mendaur ulang menggunakan hampir semua biaya kegiatan siswa

3. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Program Dana BOS secara keseluruhan bertujuan untuk membebaskan masyarakat penyandang dana pendidikan dan melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas. Selain itu, sebagai partisipasi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi institusi yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan bagi institusi yang memenuhi SPM. Biaya Sekolah SD Negeri/SDLB dan SMP/SMPLB/SDSMP Sekolah Negeri/SMPT Pengelolaan Sekolah, 2) Pembebasan dari seluruh siswa yang kurang mampu berupa pajak, poin ini berlaku baik untuk instansi negeri maupun swasta 3) Pembiayaan Siswa Sekolah Swasta (Kemendikbud, 2015).

C. METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dengan tujuan menjabarkan dan menggambarkan dengan apa adanya mengenai suatu variable, gejala, keadaan ataupun fenomena yang ada di lingkungan tertentu. Adapun guna menganalisis data yang didapatkan secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan bisa diketahui mengenai analisis konsep kebijakan publik terkhusus (BOS). Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Dimana penulis mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan dari berbagai sumber pada pengerjaan penelitian ini dan terdapat pada macam – macam material yang ada, baik dari dokumen, buku, majalah, dan sebagainya (Mirzaqon, 2018).

Sumber Data

Data yang digunakan secara umum ialah data sekunder, dimana diperolehnya data melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk mampu membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, maka bisa dikatakan langkah penyusunannya dimulai dari kesimpulan ke khusus.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi Observasi (pengamatan) dimana peneliti mengamati di lapangan secara langsung dengan bantuan berbagai pihak yang terkait, dan olah data dokumen.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pelaksanaan Kebijakan Publik (BOS)

Kebijakan didefinisikan sebagai seperangkat rencana program, kegiatan, tindakan, keputusan, dan sikap. Dengan mengeluarkan keputusan apakah banyak pihak perlu membuat, atau bertindak sebagai fase untuk menyelesaikan masalah langsung. Menetapkan suatu kebijakan merupakan bagian dari factor yang sangat penting bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Thoha politik dapat dibagi menjadi dua aspek:

- a. Kebijakan bagian dari praktik sosial, namun dalam hal ini kebijakan bukan berarti *event* tunggal atau yang dirancang. Maka, kebijakan bagian dari sebuah hasil yang diciptakan pemerintah dengan merumuskan segala kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Maksud dari kejadian tersendiri ialah kejadian yang bersumber dari kalangan tersebut serta bukan peristiwa yang hadir sendiri,

terisolasi serta asing di kalangan masyarakat.

- b. Kebijakan adalah tanggapan ketika adanya peristiwa terjadi, bagian ini termasuk bisa terjadinya konflik atau sebuah keharmonian terhadap pihak yang terkait. Hal ini juga bisa menimbulkan insentif pada suatu tindakan yang dilaksanakan bersama bagi pihak tertentu yang berperilaku tidak rasional dalam bekerja sama (Ramdhani, 2017).

Maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan yaitu aktivitas pemerintah dalam menjalankan program serta memperhatikan gejala yang terjadi pada masyarakat hingga menghasilkan suatu aturan yang bisa dilaksanakan ataupun bisa tidak dilaksanakan dan mampu menciptakan keharmonian ataupun terjadi konflik, sehingga membuat aturan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pelaksanaan kebijakan merupakan proses lanjutan artinya berada pada tahap melaksanakan baik dari individu maupun kelompok pemerintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat pembuatan kebijakan. Hasil akhir dari sebuah kebijakan tersebut mempengaruhi langkah selanjutnya apakah menghasilkan hal yang sesuai atau seperti yang diharapkan sesuai tujuan ataupun menghasilkan yang tidak sesuai harapan.

Permendiknas 2010 No. sesuai dengan 37 Pedoman Penggunaan Dana BOS, tujuan diadakannya dana BOS adalah sebagai berikut: *“Meningkatkan mutu pendidikan pada penuntasan wajib belajar sembilan tahun, kecuali sekolah rintisan yang memenuhi standar internasional.* Kebijakan publik, khususnya Dana BOS, pada dasarnya mendanai operasional sekolah secara mandiri pada saat pelaksanaannya. Di satu

sisi, kebijakan BOS mendukung modal kerja sekolah negeri/swasta. Dana BOS juga membantu orang tua mendanai kehadiran mereka di sekolah.

Istilah kebijakan juga dijabarkan Dye, ia mengungkapkan kebijakan adalah segala hal yang dilakukan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Maka, beliau mengartikan kebijakan negara tidak saja harus dilaksanakan tetapi segala hal yang dengan sengaja tidak dilakukan, karena saling memiliki pengaruh terhadap publik (Florensi, 2014).

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjutan dari pengembangan dan advokasi kebijakan (Mutiasari, 2016) oleh karena itu, implementasi kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan didasarkan pada kebijakan yang disetujui kelompok. Efek dari implementasi suatu kebijakan adalah konsekuensi dari implementasi dari kebijakan tersebut. Hasil evaluasi implementasi kebijakan menghasilkan hasil yang diharapkan (*intended*) atau tidak diharapkan (*spillover negative effect*). Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan memiliki dampak.

Implementasi kebijakan terdiri dari tiga komponen utama: 1) Spesifikasi program terperinci. Spesifikasi rinci program berkaitan dengan di mana dan bagaimana lembaga melaksanakan program dan bagaimana program atau undang-undang tersebut diinterpretasikan. 2) Alokasi sumber daya. Staf dan organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan melaksanakan program sehubungan dengan pendanaan. 3) Keputusan. Sehubungan dengan peraturan yang diterapkan, (Jann, 2007). Implementasi direktif mempengaruhi keberhasilan direktif. Jika suatu kebijakan memiliki dampak positif bagi masyarakat,

itu dianggap berhasil. Artinya politik dapat mengarahkan masyarakat sesuai dengan niat pemerintah secara lebih terarah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memantau implementasi kebijakan melalui penyusunan program dan proses implementasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan, program, dan kegiatan untuk melaksanakan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021).

Secara keseluruhan program BOS dalam pelaksanaannya sangat membantu mengurangi kemiskinan disektor bidang pendidikan sekita 20%. Hal ini dikarenakan Yayasan BOS memberikan kontribusi yang tepat bagi sekolah, namun nantinya berkontribusi terhadap kelancaran sekolah. Namun, disisi lain, pelayanan sekolah bagi siswa masih belum merata.

2. Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Edwards III berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan bagian tahapan Langkah kebijakan, yang posisinya diantara beberapa penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari kebijaksanaan tersebut, tidak hanya itu Edward III mengemukakan aspek yang menjadi pendorong kuat yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat aspek saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling memiliki pengaruh. Bebrapa factor-faktor yang terdapat akan memiliki pengaruh pelaksanaan kebijakan publik terbagi menjadi 4 unsur, yaitu:

a. Komunikasi

Adanya komunikasi yang sempurna tentunya mampu menghasilkan komunikasi yang baik. Keberhasilan mensyaratkan agar mengklaim yang seharusnya dilaksanakan. Hal yang menjadi tujuan dan sasaran akan kebijakan haruslah ditransmisikan pada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Jika terdapat tujuan yang tidak jelas atau bahkan tidak diketahui banyak orang maka hal ini akan berpengaruh pada pemikiran dari banyak pihak.

b. Sumber Daya

Sumber daya disini sangat berpengaruh bagaimana kebijakan selanjutnya. Ketika dilapangan sudah berjalan komunikasi yang baik serta jelas dan konsisten, akan tetapi jika implementor atau sumber daya kurang maka dalam pelaksanaan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya disini bisa berupa sumber daya manusia yang mengacu pada kompetensi implementator, dan sumber daya finansial seperti sarana dan prasarana.

c. Disposisi

Istilah disposisi atau kecenderungan merupakan watak atau karakteristik seseorang implementor, misalkan: komitmen, kejujuran, serta sifat menyeluruh. Jika pelaku implentasi memiliki disosiasi yang baik secara tidak langsung semua hal yang menjadi tujuan kebijakan akan menghasilkan sesuai yang ingin dicapai. Namun, ketika implementor memiliki karakteristik atau sikap berupa cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakn maka proses implementasi menjadi terhambat sehingga tidak ada kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi memunculkan pengaruh yang signifikan dalam

mengimplementasikan kebijakan. Salah satu bagian yang terpenting dalam stuktur birokrasi yaitu adanya standar operasi, hal ini menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam hal bertindak (Winarno, 2005).

Dari penjabaran di atas bisa diartikan bahwa terdapat 4 aspek saling mempengaruhi pelaksanaan dalam kebijakan mulai dari sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang dimana keempat komponen memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi.

Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan *good governance*. Untuk mencapai *good governance* tersebut perlu diketahui dimensi pencapaian yaitu:

1) Konsistensi. Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku, 2) Transparansi. Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan. Transparansi informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai; 3) Akuntabilitas. Implementasi kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Keadilan. Pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa pelayanan yang tidak diskriminatif kepada kelompok tertentu (non-diskriminatif). 5) Berpartisipasi. Partisipatif artinya masyarakat memiliki peran untuk terlibat dalam implementasi kebijakan. Masyarakat tidak hanya mendukung implementasi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menilai dan mengontrol kewenangan untuk melaksanakan kebijakan. 6) Efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan

ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksana kebijakan dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 7) Efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan (Hardiyansyah, 2018). Dimensi-dimensi inilah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris dan berarti "*evaluation*" yang berarti penilaian. Penilaian diartikan sebagai proses penilaian untuk mengambil keputusan berdasarkan seperangkat dan kesepakatan terhadap atas tujuan yang telah ditetapkan (Wibowo, 2017). Menurut Bingham, Felbinger, dkk dalam (Nugroho, 2012) ia penilaian dalam tiga bagian diantaranya:

a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi manajemen anggaran, valuasi manajemen, efisiensi, dan biaya proses politik dalam pemerintahan. Topik terkait berikut:

- 1) Penilaian kinerja, yaitu bagian dari program yang dikembangkan dari kebijakan
- 2) *Performance evaluation*, adalah yang menilai keluaran dari pada program yang dikembangkan kebijakan
- 3) *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness*

evaluation, Penilaian kinerja yang mengevaluasi hasil suatu program yang dikembangkan oleh suatu kebijakan, validitas penilaian kinerja, atau penilaian efektivitas yang menentukan apakah program kebijakan dapat berjalan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya

- 4) Penilaian efisiensi, proses yang digunakan untuk menentukan nilai biaya program dan menilai efektivitas biaya tersebut.
- 5) *Process evaluations*, yang menilai metode mana yang digunakan oleh organisasi untuk pelaksanaan proses program.
- b. Evaluasi *judicial*, yaitu membahas evaluasi yang berkaitan pada isu keabsahan hukum lingkungan tempat diaplikasikan, di dalamnya termasuk pelanggaran terhadap lembaga, sistem hukum, etika, hak asasi manusia, hingga aturan administrasi negara.
- c. Evaluasi politik, tahap ini menilai sejauh mana penerimaan pada masyarakat terhadap konsistensi politik terhadap kebijakan publik ketika sudah diaplikasikan (Anggraeni, Zauhar, dkk, 2011)

Dari berbagai istilah yang disampaikan dari berbagai cara pandang para ahli bisa disimpulkan bahwa pada evaluasi pelaksanaan kebijakan publik terdapat langkah – langkah yang ditempuh baik dari awal hingga akhir. Adanya evaluasi pada setiap pelaksanaan kebijakan tentulah sangat diharapkan atau mungkin diharuskan adanya evaluasi. Karena, dari evaluasi nanti akan mengetahui hal apa saja yang harus diperbaiki atau dipertahankan.

Adapun tahap yang dijabarkan oleh Bighman dan yang lain dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang *pertama*,

evaluasi administratif dimana tahap ini dibagi lagi menjadi lima bagian yang masing - masing memiliki fungsi yang bervariasi. Pada awalnya tahap ini lebih mengarah pada bagian administrasi baik dari segi anggaran, kedayagunaan, serta pada proses kebijakan. Kedua, evaluasi *judicial*, dimana tahap ini berfokus pada keabsahan hukum dimana kebijakan itu dilaksanakan artinya melihat kondisi pada masyarakat atau lingkungan sekitar yang dilaksanakan suatu kebijakan. Ketiga, Evaluasi Politik adalah mempertimbangkan sejauh mana kebijakan itu konsisten terhadap politik ketika dilaksanakannya kebijakan.

Analisis Kebijakan Publik (Dana BOS)

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai kebijakan publik tentulah sangat jelas kebijakan publik itu, yaitu: suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan, peraturan itu dibuat berawal dari gejala – gejala yang terjadi pada masyarakat atau melihat perkembangan dari masyarakat.

Hal yang perlu digaris bawahi bahwa tidak semua masalah publik masuk pada agenda kebijakan. Ada beberapa masalah ini yang saling bertentangan. Hanya ada isu-isu spesifik yang masuk dalam agenda politik. Salah satu prasyarat sebuah isu masuk dalam agenda politik adalah ketika isu tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan perlu ditangani (Bintari & Pandiangan, 2016).

Dewasa ini, seperti salah satu kebijakan yang dicetuskan pemerintah mengenai kebijakan pendidikan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi perhatian penulis untuk menganalisis apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang dicetuskan pemerintah. Disini menjadi perhatian semua kalangan

masyarakat karena bersifat publik. Terkait pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua kalangan baik pada usia anak – anak hingga orang dewasa. Suatu pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Bagaimana jika hal itu kebalikannya, maka dalam hal inipun berlaku kebalikannya ketika suatu lembaga pendidikan kurang memberikan kelayakan belajar secara tidak langsung tentunya akan mempengaruhi kualitas dari peserta didik itu sendiri.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai analisis konsep kebijakan publik studi kasus bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Pada Pelaksanaan kebijakan publik terkhusus Dana BOS dalam dasarnya membiayai operasional sekolahnya secara mandiri. Kebijakan BOS disatu sisi membantu sekolah negeri/swasta pada pembiayaan operasional. Dana BOS pula membantu orang tua dalam membiayai sekolah. Kebijakan publik juga mengatur dalam sebuah keputusan ataupun suatu pilihan tindakan yang dilakukan secara langsung pada pengelolaan serta pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia mengenai kepentingan publik, yakni mengacu pada rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Pada pelaksanaan dana BOS terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. *Pertama*, Komunikasi yang baik tentunya akan menjadi salah satu keberhasilan dalam sebuah kebijakan. *Kedua*, Sumber Daya, yaitu berupa sumber daya manusia

yang mengacu pada kompetensi implementator, dan sumber daya finansial seperti sarana dan prasarana. *Ketiga*, Disposisi atau kesamaan tabiat yang wajib ditumbuhkan seseorang implementor seperti: komitmen, kejujuran, dan sifat menyeluruh. *Keempat*, Struktur Birokrasi, adanya standar operasi sebagai landasan tiap implementor pada hal bertindak.

2. Rekomendasi

Rekomendasi menurut hasil dari kesimpulan di atas pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Pada pelaksanaan kebijakan terkhusus dana BOS perlunya ada komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan.
- b) Perlunya membentuk struktur Birokrasi yang tetap sebagai acuan implementor dalam bertindak.
- c) Perlunya seorang implementor memiliki sikap atau menerapkan secara penuh sikap kejujuran, tidak membedakan satu dengan yang lain serta komitmen dalam menjalankan amanah.

REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2011). *Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 504 Tahun 2010 Kepegawaian Daerah Kota Malang)*.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*.
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S.

- (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. *CosmoGov*.
<https://doi.org/10.24198/cosmogo.v.v2i2.10006>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik : konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6(1), 83–88.
- Florensi, H. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, I(3), 13–26. Retrieved from http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar
- Iskandar, J. (2012). *Kaputa Selekt Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Islamy, M. I. (1994). *Prinsip - Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (p. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia. (2015) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 80 tahun 2015
- Mariyati, T. (2015). Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110205>
- Mirzaqon, A. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, (1), 1–8.
- Mulyono, T. (2015). *Pengaruh Penggunaan Bos Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Smp N 9 Salatiga Semester Genap Tahun Pelajaran 2013-2014* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10
- Nugroho, R. (2012). *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Putri, D. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas

- Pelayanan Publik Pada Era New Normal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 5(1), 342-353.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakrta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, E. W. (2017). Evaluasi Pembelajaran Matakuliah Kewirausahaan Berbasis Proyek Pada Politeknik Lp3i Jakarta Kampus Pasar Minggu. *Jurnal Lentera Bisnis*. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v5i2.35>
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressido.